

Judul : Kerugian akibat polusi Jakarta capai Rp60 triliun
Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Kerugian akibat Polusi Jakarta Capai Rp60 Triliun

Penyemprotan jalan tidak efektif untuk mengatasi polusi udara karena itu hanya memindahkan polusi dari satu tempat ke tempat lain.

DINDA SHABRINA
dinda@mediaindonesia.com

KERUGIAN materi akibat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya tahun ini diperkirakan telah mencapai Rp60 triliun. Angka itu akan terus bertambah jika tidak ada upaya yang serius mengatasi polusi udara itu.

"Tahun 2016, 2017, sampai 2019 saja, polusinya yang tidak sepekat ini sudah Rp51 triliun. Tahun ini kita prediksi di atas Rp60 triliun kerugiannya. Beban medis yang harus dibayar masyarakat Jakarta, lo, ini. Kita belum menghitung masyarakat Jabodetabek secara keseluruhan," ujar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbang (KPBB) Ahmad Safrudin di Jakarta, kemarin, dalam diskusi Menggugat Kerugian Krisis Polusi Udara Jakarta.

Ahmad mengatakan parameter pencemaran udara itu tidak hanya *particulate matter* (PM), tetapi juga hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon. "Ada enam parameter. Hal ini yang menyebabkan polusi semakin parah," katanya.

Menurut Ahmad, tahun lalu dalam situasi yang hampir mirip dengan sekarang, yaitu diikuti kemarau yang lumayan panjang, konsentrasi dari berbagai pencemaran tadi

cukup tinggi. Misalnya untuk PM2.5 rata-rata 43-46 mikrogram/m³.

"Padahal untuk 30 mikrogram/m³ itu sebenarnya kategori tidak sehat. Bayangkan sekarang ini terjadinya beruntun membentuk tren data selama satu tahun. Setiap hari udara yang kita hirup sangat tidak sehat. Bagaimana kondisi paru-paru kita?" jelas dia.

Menurut Ahmad, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah selain menertibkan pabrik atau industri pencemar udara, menghentikan penjualan bahan bakar bertimbal (premium 88, pertalite 90, solar 48, dan dexlite), membatasi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

"Kita ingin pemerintah, baik pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyikapinya dengan tindakan nyata. Kita juga ingin mendorong agar masyarakat berani menggugat kepada pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kualitas udara yang tidak sehat ini," tegasnya.

Tidak efektif

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan penyemprotan jalan tidak efektif untuk mengatasi polusi udara karena kegiatan itu ha-

nya memindahkan polusi dari satu tempat ke tempat lain.

"Partikel PM2.5 banyak beredar di udara atas, bukan di bawah. Jadi, sebenarnya kalau menyemprot, harus di atas, bukan di bawah," kata Menkes di Jakarta, kemarin.

"Kegiatan penyemprotnya juga harus luas karena kalau sedikit, itu hanya menggeser-geser saja, malah bisa menyebarkan, pindah ke tempat lain," tambahnya.

Lebih lanjut Menkes menyampaikan ada tiga penyebab utama polusi udara, yaitu transportasi, pembangkit listrik tenaga uap yang memakai bahan bakar batu bara, dan industri-industri yang menggunakan batu bara atau bahan bakar karbon lainnya.

"Jadi, kalau mau mengurangi PM2.5 itu, yang biasanya dikurangi adalah transportasi, pembangkit listrik, dan industri. Inilah yang menyebabkan banyak PM2.5 berada di atas," pungkas Menkes.

Pada bagian lagi, Menkes meminta seluruh puskesmas yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk rutin memeriksa kualitas udara melalui kit saniter untuk memperkuat surveilans data terkait dengan polusi udara.

"Dengan itu laporannya, kita tahu di semua puskesmas di DKI Jakarta mana yang polusi udaranya tinggi," ujarnya. (Iam/Ant/X-5)